

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arifin Zainal, & Eddy o. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum*. Rajawali Pres .

Asshiddiqie Jimly. (2010). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Vol. 2). Sinar Grafika.

Hans Kelsen. (2014). *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif* (Muttaqien Raisul, Ed.; 16th ed.). Nusa Media.

Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum Pidana* (Vol. 7). Rineka Cipta.

Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Vol. 1). Alumni.

Perundang-undangan:

KUHP 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RI No.1 Tahun 2023 Redaksi Sinar Grafika Jakarta, *Sinar Grafika*, (2023)

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Edited Yogyakarta, *Pustaka Yastisia*, (2007)

PUTUSAN Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi (2006)

Edited. (2007). *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pustaka Yastisia.

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen DPK RI Jakarta, *databes peraturan*, (2024)

Jurnal:

Ahmad, & Supoyo. (2023). MENYOAL PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DALAM KUHP: ANTARA PROPORSIONALITAS PRINSIP PRIMUS INTERPARES ATAU KEMUNDURAN DEMOKRASI (QUESTIONING THE PRESIDENTIAL CONFUSE ARTICLE IN THE KUHP: BETWEEN THE PROPORTIONALITIES OF THE PRIMUS INTERPARES PRINCIPLES OR DEMOCRACY DEGREEMENT). *Hukum Dan HAM*, 2.

Alhakim Abdurrakhman. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.

- Arrasuli. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI. *Jurnal Of Swara Justisia*, 7.
- Auzan. (2023). Analisis Klasifikasi Penghinaan Terhadap Pejabat Negara di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pada Media Sosial). *Hukum*, 2.
- Candra. (2023). ANALISIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG IRAK: ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI. *Kertha Desa*, 11.
- Della. (2018). KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DEMOKRASI: CATATAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA. *Lex Scientia Law Review*, 2.
- DPK RI. (2024). *Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - tentang UUD 1945 dan Amandemen*. databes peraturan.
- Kusuma Ersu. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Hukum Dan Ham*, 1.
- Laila Eparius. (2024). Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan (Studi Putusan Nomer 33/Pid.C/2022/PN Pdg). *Legal Science* , 1.
- Lubis. (2024). Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kepala Negara dalam KUHPBaru dan Hukum Pidana Islam. *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, 6.
- Melisa. (2023). REFLEKSI KRITIS REKRIMINALISASI PENGHINAAN PRESIDEN DI INDONESIA . *Ilmiah Indonesia*, 8.
- Mubarok Nafi. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan. *Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27.
- Periani Aniek, & Rusito. (2022). Hak Memperoleh Keadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Faculty of Law*, 4.
- Rezeki. (2021). Penghapusan Pidana Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Pada Khusus Penghinaan Di Media Sosial. *Lex Generalis*, 2.

Rodes Ober Adi Guna Pardosi. (2023). Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Dalam Perumusan Kebijakan. *LEGISLASI INDONESIA*, 20.

Setyawan. (2023). Pemaknaan Asas Legalitas Materil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Multi Disiplin Ilmu*, 1.

Supriyadi. (2016). *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintahan Yang Sah Dalam R KUHP*. ICJR.

Valirian Dino. (2022). KRITERIA KRIMINALISASI: ANALISIS PEMIKIRAN MOELJATNO, SUDARTO, THEO DE ROOS, DAN IRIS HAENEN. *Hukum*, 8.

Wahyu Sry. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1.

Zul. (2025). Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern. *Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2.

Situs Online:

Dian. (n.d.). *MELINDUNGI EKSPRESI Analisis Pidana dan HAM Putusan Pengadilan di Indonesia*. Lelp.

Mueliono. (2021). *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek Van Srafrecht Dan Wetboek Van Srafrecht Voor Nederlandsch indië KUHP Blanda Dan KUHP Indonesia*. ICJR.

Tofik. (2022). *Hukum Pidana (Putera Yasmono)*. Sangir Multi Usaha.